

**KOLABORASI AKTOR *PENTAHHELIX* DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Febryan Wiradesta
NPP. 32.0215

Asdaf Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: febryanwiradesta@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H Suhajar Diantoro, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The handling of social issues such as street children, the homeless, and beggars has become a serious challenge in the city of Palembang. The city government has issued Regional Regulation Number 12 of 2013 as an effort toward social rehabilitation; however, its implementation still faces obstacles.* **Purpose:** *This study aims to analyze the collaboration among Pentahelix actors, consisting of the government, private sector, community, academics, and media, in the rehabilitation of street children, the homeless, and beggars in Palembang.* **Method:** *The research approach used is descriptive qualitative with 3 techniques, namely data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The methods used in analyzing data are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The theory used refers to the collaboration model of Friend and Cook (2010), which emphasizes five components: personal commitment, communication skills, interaction process, program or services, and context.* **Result:** *The results of this research show that collaboration among actors has been initiated but remains suboptimal. This is shown by the absence of collaboration between the government and the private sector and between the media and the government. Supporting factors identified include work compliance, motivation, and interaction processes within a regulatory framework aligned with their roles. Meanwhile, inhibiting factors include the lack of structured programs, absence of collaboration between the social service and the private sector, as well as budget and resource limitations.* **Conclusion:** *This study suggests the need for strategies to build partnerships with the private sector in the rehabilitation of street children, the homeless, and beggars in Palembang, along with advocating for budget allocation and the establishment of social shelters for them.*

Keywords: *Pentahelix Actor Collaboration, Social Service Office, Rehabilitation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Penanganan masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis menjadi tantangan serius di Kota Palembang. Pemerintah Kota telah menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2013 sebagai upaya pembinaan, namun implementasinya masih menemui hambatan.* **Tujuan:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi aktor Pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media dalam pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang.* **Metode:** *Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 3 teknik yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Teori yang digunakan merujuk pada kolaborasi menurut Friend and Cook (2010) yang menekankan lima komponen: *personal commitment, communication skills, interaction process, program or services, dan context.**

Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor telah berjalan namun belum mencapai hasil yang optimal. Yang ditunjukkan dengan belum adanya kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta dan antara media dan pemerintah. Ditemukan faktor pendukung seperti adanya kepatuhan bekerja, motivasi serta dan proses interaksi dalam kerangka regulasi yang sesuai dengan pekerjaan, serta faktor penghambat seperti kurangnya program, belum adanya kolaborasi antara dinas sosial dan pihak swasta serta keterbatasan anggaran dan sumber daya. **Kesimpulan:** Saran pada penelitian ini yaitu diperlukan strategi untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang serta mengusulkan alokasi anggaran dan penyediaan panti sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Kata kunci: Aktor Pentahelix, Dinas Sosial, Kolaborasi, Pembinaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang mencakup aspek politik, tata kelola pemerintahan, serta persoalan sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, dan lingkungan hidup. Permasalahan sosial merupakan isu mendesak yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar manusia. Taftazani (2017) menjelaskan bahwa persoalan-persoalan sosial sering kali dipicu oleh ketidakadilan dan pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam sistem pemerintahan, penanganan masalah sosial menjadi bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola kebijakan sosial yang melibatkan berbagai aktor, termasuk perangkat daerah teknis (Hamid, 2018). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menangani isu sosial, termasuk permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (Anjal-Gepeng). Salah satu contohnya adalah Pemerintah Kota Palembang yang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Tingginya angka kemiskinan di Kota Palembang yang mencapai 948,84 ribu orang atau 10,51% dari total penduduk, mendorong peningkatan jumlah Anjal-Gepeng setiap tahunnya. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Data lapangan tahun 2024 mencatat peningkatan hingga 170 orang yang tersebar di berbagai titik kota dan kerap menimbulkan keresahan karena dikaitkan dengan tindakan kriminal seperti pencopetan, peredaran narkoba, dan kekerasan.

Perda Nomor 12 Tahun 2013 menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana penertiban dan pembinaan Anjal-Gepeng melalui langkah-langkah perlindungan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, hingga jaminan sosial. Namun, efektivitas kebijakan tidak dapat bergantung pada pemerintah semata. Penanganan masalah sosial yang kompleks membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Model *Pentahelix* yang terdiri dari lima unsur utama (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media) diyakini mampu menjawab tantangan ini (Lindmark *et al.*, 2009 dalam Pratama dkk., 2024).

Beberapa studi internasional terkini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lintas aktor sangat efektif dalam mengatasi persoalan sosial berbasis komunitas. Torres & Pina (2021) menjelaskan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam sektor publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi kebijakan, khususnya dalam pelayanan sosial. Aleksandrov *et al.* (2020) menekankan bahwa efektivitas kolaborasi ditentukan oleh keseimbangan kekuatan antaraktor, komunikasi yang terbuka, serta motivasi

kolektif dalam menjawab kebijakan sosial yang kompleks. Dalam konteks tata kelola kebijakan lokal, Bartoletti & Faccioli (2016) menggarisbawahi pentingnya partisipasi warga dan inovasi kelembagaan untuk memastikan integrasi program sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Setianto *et al.* (2022) menemukan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan publik di tingkat lokal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana tercermin dalam praktik kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam berbagai program daerah.

Setiap aktor memiliki peran penting. Pemerintah sebagai regulator, swasta melalui program CSR (Sholehuddin dkk., 2020), media sebagai penyebar informasi dan kontrol publik (Habibah & Irwansyah, 2021), masyarakat sebagai pengawas sosial, serta akademisi sebagai pengkaji dan penyedia solusi berbasis riset (Caesar & Listania, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana kolaborasi aktor *Pentahelix* telah diterapkan dalam pembinaan Anjal-Gepeng di Kota Palembang dan bagaimana kolaborasi tersebut dapat diperkuat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah utama mengenai bagaimana kolaborasi aktor *Pentahelix* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi tersebut. Permasalahan ini muncul sebagai respons terhadap realitas sosial di Kota Palembang yang masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis setiap tahunnya. Meskipun pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 sebagai landasan hukum pembinaan, implementasinya masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum sinergisnya kerja sama antaraktor, terutama antara pemerintah, sektor swasta, dan media.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terlihat dari keterbatasan penelitian terdahulu yang cenderung hanya fokus pada kolaborasi antarinstansi pemerintahan saja. Misalnya, penelitian oleh Ramadhan (2022) hanya menyoroti kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Pendekatan ini belum melibatkan unsur-unsur lain yang memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan sosial, seperti peran swasta melalui CSR, kontribusi akademisi dalam riset dan rekomendasi, partisipasi masyarakat, serta peran media dalam membentuk opini publik.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan model kolaborasi masih terbatas pada *triple helix* atau pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan sedikit aktor. Sedangkan, kompleksitas permasalahan sosial di daerah perkotaan seperti Palembang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Model *Pentahelix*, yang mencakup unsur *Academician, Business, Community, Government, dan Media* (ABCGM), belum banyak dikaji secara khusus dalam konteks pembinaan sosial di Kota Palembang, terutama dalam implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2013.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi bagaimana kelima unsur dalam model *Pentahelix* berperan secara nyata dalam mendukung kebijakan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Penelitian ini tidak hanya memotret proses kolaborasi yang telah berlangsung, tetapi juga mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan strategi kolaboratif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan model kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan sosial, sekaligus memberikan gambaran empiris bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sinergi dalam menyelesaikan permasalahan sosial secara terstruktur dan partisipatif.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah banyak dilakukan sebelumnya oleh berbagai peneliti dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian oleh Putri (2024) yang berjudul “Kolaborasi Model *Pentahelix* dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar.” Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kolaborasi aktor dalam penanganan anak jalanan menggunakan model *Pentahelix*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi belum berjalan efektif karena lemahnya sinergi antarsektor yang terlibat.

Penelitian lain dilakukan oleh Ramadhani dkk. (2024) dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.” Penelitian ini mengkaji tata kelola kolaboratif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif sudah cukup baik, meskipun masih ditemukan kendala seperti keterbatasan struktur jaringan dan modal sumber daya.

Selanjutnya, penelitian oleh Dahlah & Darwis (2017) dalam karya “Prinsip Manajemen Kolaborasi Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar” menyoroti pentingnya prinsip-prinsip manajemen dalam proses kolaborasi antarinstansi pemerintah, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Penelitian ini menekankan perlunya perencanaan program yang matang dan koordinasi yang efektif dalam pembinaan anak jalanan di lingkungan perkotaan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ramadhan (2022) dalam studinya berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Balikpapan.” Penelitian ini menemukan bahwa program Panji Berbakat (Penanganan Anak Jalanan Integratif Berbasis Masyarakat) belum berjalan optimal karena rendahnya motivasi implementasi program serta lemahnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor.

Penelitian terakhir yang relevan adalah karya Afjan & Hayat (2023) berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang).” Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn dan menyimpulkan bahwa implementasi Perda tersebut belum berjalan secara maksimal akibat kendala pada sumber daya manusia dan dukungan kebijakan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, diketahui bahwa sebagian besar kajian hanya memfokuskan perhatian pada peran pemerintah atau kolaborasi antarinstansi pemerintah. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis kolaborasi antaraktor menggunakan model *Pentahelix* dalam konteks pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di daerah perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai pelengkap dan pengembangan studi sebelumnya dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif yang lebih luas, melibatkan unsur pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada pendekatan analisis kolaborasi lintas aktor dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan menggunakan model *Pentahelix* secara menyeluruh. Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar hanya menitikberatkan pada aspek kolaborasi antarinstansi pemerintahan, seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tanpa melibatkan unsur-unsur lain di luar pemerintah. Sebagai contoh, penelitian Ramadhan (2022) hanya mengkaji kerja sama antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam pembinaan anjal-gepeng di Kota Palembang, sementara dimensi kontribusi aktor swasta, media, masyarakat, dan akademisi belum dianalisis secara komprehensif.

Selain itu, beberapa penelitian yang menggunakan model kolaborasi seperti *Collaborative Governance* maupun *Triple Helix* belum menyentuh aspek keterlibatan semua

unsur strategis dalam tata kelola sosial secara menyeluruh. Model *Pentahelix* yang digunakan dalam penelitian ini (melibatkan lima unsur utama, yaitu *Academician, Business, Community, Government, dan Media*) diperkenalkan sebagai bentuk perluasan dan penyempurnaan dari pendekatan terdahulu, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan sosial di tingkat daerah.

Kebaruan lain dalam penelitian ini terletak pada fokus lokus penelitian, yaitu Kota Palembang, yang merupakan salah satu kota dengan angka kemiskinan dan jumlah anjal-gepeng tertinggi di Sumatera Selatan, namun masih minim dikaji secara khusus melalui pendekatan *Pentahelix*. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran masing-masing aktor, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan kendala kolaborasi lintas aktor terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya sinergi antaraktor di luar pemerintah dalam penanganan masalah sosial. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun akademisi dalam menyusun kebijakan kolaboratif yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi aktor *Pentahelix* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang dengan menggunakan lima komponen kolaborasi menurut teori Friend and Cook, yaitu *personal commitment, communication skills, interaction process, program or services, dan context*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan model kolaboratif berbasis *Pentahelix*, serta menjadi rekomendasi strategis dalam penyusunan kebijakan pembinaan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika permasalahan sosial di daerah perkotaan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dinilai paling sesuai untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi aktor *Pentahelix* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menjelajahi makna, dinamika, serta hubungan sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Menurut Simangunsong (2019), pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena sosial dalam konteks alami melalui perspektif partisipan. Hal ini sejalan dengan Nurdin & Hartati (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada kedalaman data, bukan keluasan, serta sangat cocok digunakan untuk memahami perilaku, tindakan, dan hubungan sosial dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat holistik dan kontekstual, dengan menggali pengalaman, pandangan, dan praktik para aktor yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Metode ini juga dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengungkap dinamika kolaborasi lintas sektor, bukan sekadar mengukur besaran data kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposif, yaitu mereka yang

dinilai memiliki pengetahuan, keterlibatan langsung, dan posisi strategis dalam pembinaan anjal-gepeng. Informan berasal dari unsur pemerintah (Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palembang), sektor swasta (perusahaan pelaksana program CSR), media lokal, akademisi, serta tokoh masyarakat atau komunitas sosial. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Palembang, karena memiliki kewenangan teknis dalam pelaksanaan pembinaan, pemahaman terhadap kebijakan daerah, serta keterlibatan aktif dalam proses koordinasi dengan pihak-pihak eksternal. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh bersifat relevan, otentik, dan mencerminkan realitas kebijakan di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan kota besar dengan angka urbanisasi tinggi dan kasus anjal-gepeng yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kota Palembang juga telah memiliki perangkat hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pembinaan sosial dan menjadi objek utama dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan memuat temuan dari pengolahan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori kolaborasi Friend & Cook (2010), yang mencakup lima komponen: *personal commitment*, *communication skills*, *interaction processes*, *program or services*, dan *context*. Analisis ini digunakan untuk menilai bagaimana kolaborasi antaraktor *Pentahelix* terwujud dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang.

3.1. Kolaborasi Aktor *Pentahelix* Pembinaan dalam Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan bagian dari tugas pemerintahan yang dilaksanakan secara kolaboratif agar mencapai hasil yang optimal. Di Kota Palembang, upaya pembinaan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif pelaksanaan pembinaan tersebut melalui pendekatan kolaborasi aktor *Pentahelix* yang mencakup akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media. Analisis dilakukan menggunakan teori kolaborasi Friend and Cook (2010), yang menekankan lima komponen utama dalam proses kolaboratif, yaitu komitmen personal, keterampilan komunikasi, proses interaksi, pelaksanaan program atau layanan, dan konteks organisasi. Kelima komponen ini dianalisis berdasarkan data hasil wawancara dan dokumen sekunder untuk menggambarkan secara faktual pelaksanaan kolaborasi lintas aktor dalam konteks pembinaan sosial di Kota Palembang.

a. *Personal Commitmen* (Komitmen Personal)

Dimensi *personal commitment* dalam kolaborasi aktor *Pentahelix* menunjukkan bahwa sebagian besar aktor, khususnya dari unsur pemerintah seperti Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palembang, memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Hal ini ditunjukkan melalui kesediaan menjalankan peran secara konsisten, pelibatan aktif dalam kegiatan penjangkauan, serta dukungan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Komitmen ini juga tercermin dari adanya program-program tahunan dan pengalokasian sumber daya, meskipun masih bersifat terbatas.

Namun, dari sisi aktor non-pemerintah seperti swasta, media, dan sebagian masyarakat, tingkat komitmen masih bervariasi. Beberapa perusahaan belum sepenuhnya mengintegrasikan isu sosial ini dalam program CSR mereka, sementara partisipasi media

masih terbatas pada pemberitaan pasif. Kurangnya koordinasi lintas sektor dan belum adanya forum kolaborasi rutin juga menjadi kendala dalam memperkuat komitmen bersama. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan *personal commitment* lintas aktor masih diperlukan agar kolaborasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

b. *Communication Skills* (Kemampuan Berkomunikasi)

Pada dimensi *communication skills*, ditemukan bahwa kemampuan komunikasi antaraktor Pentahelix di Kota Palembang belum berjalan secara optimal. Pemerintah, khususnya Dinas Sosial, telah memiliki mekanisme penyampaian informasi melalui media sosial dan koordinasi internal antarinstansi. Namun, komunikasi lintas sektor seperti dengan pihak swasta, media, dan masyarakat masih bersifat sporadis dan belum terbangun secara sistematis. Hal ini berdampak pada kurang tersampainya informasi program pembinaan secara luas dan menyeluruh kepada seluruh aktor yang berkepentingan.

Beberapa kendala komunikasi yang muncul antara lain adalah tidak adanya forum komunikasi terpadu, perbedaan persepsi terhadap peran masing-masing aktor, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses sosialisasi dan pelaporan. Selain itu, informasi yang disampaikan kepada media juga belum diolah secara strategis untuk membangun opini publik yang mendukung kebijakan pembinaan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan komunikasi dan pembentukan saluran komunikasi formal antaraktor menjadi hal yang mendesak untuk memperkuat efektivitas kolaborasi.

c. *Interraction Process* (Proses Interaksi)

Pada dimensi *interaction process*, penelitian menunjukkan bahwa interaksi antaraktor dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi secara maksimal. Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Satpol PP telah melakukan penjangkauan dan koordinasi internal secara rutin, namun keterlibatan aktor lain seperti swasta, media, dan akademisi dalam interaksi lintas sektor masih terbatas. Kolaborasi cenderung bersifat top-down dan berbasis perintah, bukan interaksi yang terbuka dan partisipatif.

Interaksi antaraktor juga belum didukung oleh mekanisme bersama seperti forum lintas sektor atau platform koordinasi reguler. Dalam beberapa kegiatan pembinaan, pihak swasta dan masyarakat hanya terlibat secara insidental, seperti saat pelaksanaan bakti sosial atau program CSR tertentu, bukan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Akibatnya, perumusan solusi dan strategi pembinaan seringkali tidak mencerminkan aspirasi serta kapasitas dari semua pihak yang seharusnya terlibat dalam proses kolaboratif.

Kurangnya intensitas dan keberlanjutan interaksi antaraktor juga berdampak pada lambatnya respons terhadap dinamika di lapangan, seperti peningkatan jumlah anjal-gepeng musiman. Untuk itu, diperlukan pembentukan mekanisme komunikasi dan interaksi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, seperti pembentukan tim kerja bersama, pelatihan kolaboratif lintas sektor, serta pelibatan aktif komunitas dan akademisi dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan pembinaan sosial di Kota Palembang.

d. *Program or Services* (Program atau Pelayanan)

Pada dimensi *program or services*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Sosial telah memiliki sejumlah program pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, seperti penjangkauan, penyuluhan, serta rehabilitasi sosial. Program-program tersebut telah dilaksanakan secara rutin dan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Namun demikian, program tersebut masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi

dengan peran dari unsur swasta, media, komunitas, dan akademisi dalam skema kolaboratif yang utuh.

Kontribusi pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) masih bersifat sporadis dan belum diarahkan secara spesifik untuk mendukung pembinaan anjal-gepeng secara berkelanjutan. Demikian pula, keterlibatan akademisi dalam penyusunan atau evaluasi program juga belum terstruktur. Sementara media cenderung hanya menjadi pihak peliput, bukan bagian dari sistem penyampaian layanan informasi yang mendukung program pembinaan. Ketidakterlibatan ini menunjukkan adanya celah koordinasi yang berdampak pada terbatasnya daya jangkauan serta efektivitas pelaksanaan program.

Oleh karena itu, agar kolaborasi dapat berjalan optimal, diperlukan penyesuaian program atau layanan yang lebih inklusif dan berbasis peran aktif dari seluruh aktor Pentahelix. Pemerintah perlu memfasilitasi integrasi program lintas sektor, mengembangkan kolaborasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, serta mendorong partisipasi swasta dan komunitas melalui insentif kebijakan dan forum koordinasi. Penguatan struktur program yang melibatkan semua unsur akan mendukung pembinaan sosial yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas.

e. **Context (Konteks)**

Pada dimensi *context*, hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks kelembagaan dan kebijakan di Kota Palembang telah menyediakan dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Peraturan ini memberikan legitimasi kepada perangkat daerah, khususnya Dinas Sosial dan Satpol PP, dalam menjalankan pembinaan sosial. Namun, secara praktik, belum semua aktor Pentahelix memahami dan menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari masih rendahnya keterlibatan aktor swasta dan media dalam mendukung program-program pembinaan yang dicanangkan pemerintah daerah. Ketidakterlibatan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya koordinasi, tetapi juga oleh minimnya pemahaman terhadap tanggung jawab sosial dalam konteks penanganan masalah anjal-gepeng.

Selain itu, struktur birokrasi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan di lapangan masih bersifat administratif dan belum fleksibel dalam membangun ruang kolaborasi. Lingkungan kerja yang hierarkis dan kaku menyebabkan inisiatif kolaboratif dari luar pemerintah kurang mendapatkan respons yang cepat. Belum adanya forum formal lintas sektor atau regulasi turunan yang mengatur peran masing-masing aktor dalam kerangka kolaborasi juga menjadi kendala dalam memperkuat konteks kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pendekatan birokrasi yang lebih adaptif, serta pembentukan struktur kolaborasi berbasis regulasi yang mampu mengakomodasi peran semua aktor secara setara dalam konteks pembinaan sosial di Kota Palembang.

3.2. Faktor Pendukung dalam Kolaborasi Aktor *Pentahelix* dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Faktor pendukung dalam kolaborasi aktor *Pentahelix* di Kota Palembang terletak pada adanya komitmen dan kepatuhan institusional dari pemerintah daerah, terutama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keduanya secara aktif menjalankan program-program pembinaan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Komitmen ini tercermin dari keberlangsungan kegiatan penjangkauan, penyuluhan, dan pembinaan sosial yang dilaksanakan rutin, serta penyediaan anggaran meskipun masih terbatas. Selain itu, struktur birokrasi yang sudah memiliki jalur koordinasi internal memungkinkan respons cepat terhadap permasalahan anjal-gepeng di lapangan.

Selain pemerintah, dukungan dari masyarakat sipil dan komunitas lokal juga menjadi kekuatan penting. Sejumlah organisasi sosial dan relawan terlibat secara langsung dalam kegiatan penyaluran bantuan, edukasi, hingga pendampingan terhadap kelompok rentan, meskipun masih bersifat inisiatif individu atau kelompok kecil. Kehadiran komunitas ini memperkuat dimensi partisipatif dalam kolaborasi. Media lokal juga turut mendukung melalui pemberitaan kegiatan pembinaan dan isu-isu sosial yang berkaitan dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Fungsi media dalam menyampaikan informasi publik turut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan membentuk opini yang mendukung upaya pembinaan.

Dari unsur akademisi dan swasta, terdapat indikasi dukungan yang tumbuh secara bertahap. Akademisi mulai melibatkan diri dalam penelitian-penelitian sosial, diskusi kebijakan, dan pemberian rekomendasi berbasis riset terhadap isu anjal-gepeng. Beberapa perusahaan swasta juga telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pelatihan kerja, bantuan pangan, dan kegiatan sosial lainnya. Meskipun kontribusi sektor ini belum optimal, keberadaannya menunjukkan bahwa kerangka kolaborasi Pentahelix memiliki potensi kuat untuk ditingkatkan. Apabila difasilitasi melalui forum bersama dan kebijakan integratif, maka kolaborasi antaraktor dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas dalam upaya pembinaan sosial di Kota Palembang.

3.3. Faktor Penghambat dalam Kolaborasi Aktor *Pentahelix* dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Faktor penghambat utama dalam kolaborasi aktor *Pentahelix* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang adalah minimnya sinergi antaraktor. Meskipun pemerintah telah menetapkan dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, implementasinya belum sepenuhnya melibatkan unsur-unsur lain seperti swasta, media, akademisi, dan masyarakat dalam satu sistem yang terkoordinasi. Kolaborasi yang ada cenderung bersifat sektoral dan insidental, tidak berbasis forum komunikasi lintas sektor yang rutin dan terstruktur. Akibatnya, perumusan program dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh unsur pemerintah saja.

Selain itu, terdapat kendala dalam alokasi anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah, kapasitas, maupun pelatihan petugas yang menangani anjal-gepeng. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program pembinaan belum menjangkau seluruh wilayah atau kelompok sasaran secara optimal. Sektor swasta juga belum menunjukkan konsistensi dalam program CSR yang secara khusus menyoroti isu anak jalanan dan gelandangan. Sebagian besar program sosial yang dijalankan masih bersifat umum dan tidak diarahkan pada pemutusan siklus kemiskinan atau pemberdayaan berkelanjutan.

Media dan akademisi pun menghadapi hambatan dalam keterlibatannya. Peran media lebih banyak terbatas pada peliputan sesaat, belum diarahkan untuk membangun narasi positif yang mendukung program pembinaan. Sementara itu, akademisi belum difungsikan secara strategis sebagai mitra pemerintah dalam riset kebijakan atau evaluasi program. Ketiadaan regulasi teknis atau nota kesepahaman yang mengatur peran masing-masing aktor juga memperlemah koordinasi. Oleh karena itu, penguatan struktur koordinasi, penyusunan pedoman kolaboratif, serta pelibatan aktif lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar hambatan ini dapat diminimalkan dan tujuan pembinaan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi aktor *Pentahelix* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang telah berjalan, namun belum optimal. Keterlibatan pemerintah, khususnya Dinas Sosial dan Satpol PP,

tergolong dominan dalam pelaksanaan program. Hal ini sama halnya dengan temuan Dahlan & Darwis (2017) dalam konteks Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa kolaborasi masih didominasi oleh instansi pemerintah, dengan minimnya kontribusi dari unsur non-pemerintah seperti swasta dan akademisi. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut karena di Kota Palembang, kontribusi sektor swasta melalui CSR maupun pelibatan media dan akademisi juga masih belum maksimal, bahkan cenderung bersifat insidental dan tidak terstruktur.

Berbeda dengan temuan Ramadhani dkk. (2024) dalam penelitiannya mengenai *Collaborative Governance* di Desa Ngeplakrejo yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif dan harmonis antaraktor, penelitian ini justru menemukan bahwa forum komunikasi lintas sektor belum tersedia secara formal di Kota Palembang. Koordinasi masih bersifat top-down dan belum memberikan ruang partisipatif yang luas kepada unsur masyarakat maupun komunitas. Dengan demikian, struktur kolaborasi di Kota Palembang belum memungkinkan seluruh unsur Pentahelix menjalankan perannya secara setara dan berkesinambungan.

Selain itu, berbeda dengan temuan Putri (2024) yang menyatakan bahwa kolaborasi Pentahelix di Kota Makassar belum efektif karena lemahnya sinergi antarpihak, penelitian ini justru menemukan bahwa pada aspek-aspek tertentu, seperti *personal commitment* dari unsur pemerintah, sinergi sudah terbentuk. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kolaborasi sangat bergantung pada faktor lokal, seperti dukungan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan karakteristik pemangku kepentingan. Temuan ini memperkuat argumen Caesar dan Listania (2021), yang menekankan pentingnya peran akademisi dan media dalam memperkuat kolaborasi kebijakan sosial, meskipun di Kota Palembang keduanya belum terintegrasi secara sistematis.

Lebih lanjut, temuan ini memperluas cakupan dari penelitian Ramadhan (2022) mengenai *Panji Berbakat* di Kota Balikpapan, di mana disebutkan bahwa rendahnya motivasi pelaksanaan dan lemahnya komunikasi menjadi kendala utama. Dalam konteks Palembang, hambatan juga terjadi pada aspek komunikasi dan interaksi, namun terdapat tambahan faktor seperti keterbatasan anggaran, ketidaksinambungan program lintas aktor, serta ketiadaan regulasi teknis turunan dari Perda Nomor 12 Tahun 2013 yang dapat mengikat seluruh pihak dalam kerangka kolaborasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat beberapa temuan sebelumnya, tetapi juga memperjelas bahwa keberhasilan kolaborasi Pentahelix sangat ditentukan oleh kejelasan peran, keberadaan mekanisme koordinasi reguler, serta dukungan politik dan administratif dari pemerintah daerah. Temuan ini juga mengisi celah dalam literatur dengan menambahkan perspektif kontekstual dari daerah yang belum banyak diteliti melalui pendekatan kolaborasi lima aktor secara utuh.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya inisiatif kolaboratif dari komunitas sosial berbasis kerelawanan yang turut aktif dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang. Meskipun tidak terstruktur dalam sistem formal pemerintah, mereka berperan nyata dalam pendampingan, distribusi bantuan, dan penyuluhan di lapangan. Keterlibatan komunitas ini menunjukkan bahwa potensi aktor nonformal cukup besar, namun masih belum diintegrasikan secara resmi ke dalam mekanisme kolaborasi Pentahelix. Bila difasilitasi oleh pemerintah, komunitas ini dapat menjadi mitra penting dalam memperkuat dimensi partisipatif dan memperluas jangkauan program pembinaan.

Selain itu, ditemukan bahwa masih kuat pandangan masyarakat dan pelaku usaha bahwa pembinaan anjal-gepeng merupakan tanggung jawab penuh pemerintah. Minimnya pemahaman mengenai kolaborasi lintas sektor menyebabkan rendahnya inisiatif swasta dan media untuk terlibat secara aktif. Hal ini menjadi hambatan kultural yang memperlemah semangat kolaboratif. Edukasi publik dan sosialisasi yang lebih intensif sangat diperlukan agar

seluruh aktor memahami bahwa penanganan masalah sosial adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pemerintah semata.

Temuan lainnya berkaitan dengan ketiadaan pedoman teknis atau SOP pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, yang menyebabkan pelaksanaan kolaborasi di lapangan cenderung tidak terarah. Meskipun ada dasar hukum, tidak terdapat peraturan turunan yang mengatur peran dan bentuk kolaborasi antarsektor secara rinci. Akibatnya, inisiatif kolaboratif seringkali bergantung pada persepsi dan kebijakan masing-masing lembaga. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis sebagai landasan operasional kolaborasi agar seluruh aktor memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan pembinaan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi aktor *Pentahelix* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang telah dimulai namun belum terlaksana secara optimal. Unsur pemerintah, khususnya Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), merupakan aktor yang paling aktif dalam pelaksanaan pembinaan, sementara kontribusi dari aktor lain seperti swasta, media, akademisi, dan masyarakat masih terbatas dan belum terintegrasi dalam mekanisme yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa model kolaborasi *Pentahelix* belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan prinsip kesetaraan dan sinergi lintas sektor.

Analisis lima komponen kolaborasi menurut Friend and Cook (2010) yakni *personal commitment, communication skills, interaction processes, program or services, dan context*, menunjukkan bahwa masing-masing aspek masih menghadapi tantangan. Komitmen pemerintah cukup kuat, namun belum diimbangi oleh aktor non-pemerintah. Keterampilan komunikasi dan interaksi lintas sektor masih lemah karena belum adanya forum kolaboratif formal. Program pembinaan telah tersedia tetapi bersifat sektoral dan tidak berbasis kolaborasi lintas aktor, sedangkan konteks regulasi hanya mencakup perda utama tanpa didukung aturan teknis atau SOP pelaksana yang dapat memperkuat sinergi antarpihak.

Selain itu, ditemukan faktor pendukung seperti adanya kepatuhan kerja dari aktor pemerintah, inisiatif dari komunitas sosial, serta dukungan akademisi dan media dalam lingkup terbatas. Di sisi lain, faktor penghambat yang dominan adalah minimnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran peran kolektif dari sektor swasta dan media, serta belum adanya regulasi teknis sebagai panduan pelaksanaan kolaborasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan peran dan kapasitas seluruh aktor, pembentukan forum komunikasi lintas sektor, serta penyusunan kebijakan turunan yang mampu menjamin keterlibatan semua pihak secara aktif dan berkelanjutan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada wilayah Kota Palembang sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses menyebabkan tidak semua aktor *Pentahelix* terlibat secara merata, khususnya dari sektor swasta dan media. Pendekatan kualitatif yang digunakan juga membatasi hasil pada pemahaman kontekstual, bukan pengukuran kuantitatif.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan di wilayah lain sebagai perbandingan, serta melibatkan lebih banyak aktor secara seimbang. Pendekatan *mixed methods* juga dapat digunakan agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan terukur, terutama dalam menilai efektivitas kolaborasi antaraktor dalam pembinaan sosial.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Palembang atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan juga diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, serta seluruh pihak dari sektor swasta, komunitas sosial, akademisi, dan media lokal yang telah bersedia menjadi informan. Kontribusi informasi dan pengalaman yang diberikan sangat berperan dalam kelancaran proses pengumpulan data dan penyusunan analisis. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan dan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pembinaan sosial di Kota Palembang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afjan, W. Y. P., & Hayat. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Journal Publicuho*, 6(2). <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>
- Aleksandrov, E., Bourne, H., & Frynas, J. G. (2020). Stakeholder Expectations and Firms' Use of Soft and Hard Power in Policy Engagement. *Business Ethics Quarterly*, 30(3), 337–367. <https://doi.org/10.1017/beq.2019.43>
- Bartoletti, R., & Faccioli, F. (2016). Public Engagement, Local Policies, and Citizens' Participation: A Snapshot of Italian Experiences. *Partecipazione e Conflitto*, 9(2), 372–397. <https://doi.org/10.1285/i20356609v9i2p372>
- Caesar, M. R., & Listania, T. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Neo Politea*, 1(2). <https://doi.org/10.53675/Neopolitea.V1i2.104>
- Dahlah, & Darwis, M. (2017). Prinsip Manajemen Kolaborasi Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, Vol. 4, No. 1, 2017. <https://doi.org/10.26858/ja.v4i1.3499>
- Friend, M. & Cook, L. (2010). *Interactions: Collaboration Skills for School Professionals*. (6th ed.). Singapore: Pearson Ed
- Habibah, F., & Irwansyah, I. (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Lindmark, A., Edvinsson, L., Stureson, E., & Nilsson-Roos, M. (2009). 116 Difficulties of Collaboration for Innovation-A Study in the Öresund Region. *ISPIM Innovation Symposium*. <https://www.researchgate.net/publication/290600081>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Pratama, P. J., Dewo, L. P., & Rahmat, H. K. (2024). Model Sinergitas Pentahelix dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *In Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management*
- Putri, A. R. A. (2024). *Kolaborasi Model Penta Helix dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar (Collaboration of the Penta Helix Model in Handling Street Children in Makassar City)*. Bandung: Alfabeta.
- Ramadhan, S. M. G. A. (2022). Collaborative Governance dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 133–145. <https://doi.org/10.31289/jip.v7i2.5782>
- Ramadhani, N. P., Santoso, R. Slamet, Astuti, & R. Sunu. (2024). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa d Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.44361>

- Setianto, R. H., Dhewanto, W., & Prasetyo, Y. T. (2022). Stakeholder Collaboration in Public Service Innovation: Evidence from Local Government in Indonesia. *Public Organization Review*, 22(1), 185–202. <https://doi.org/10.1007/s11115-021-00515-1>
- Sholehuddin, S., Syafira, D. A., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart Dalam Memperkerjakan Penyandang Disabilitas. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/10.24198/Jppm.V7i2.29054>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Taftazani, B. M. (2017). Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial. *Share : Social Work Journal*, <https://doi.org/10.24198/Share.V7i1.13822>
- Torres, L., & Pina, V. (2021). Public Sector Transparency and Accountability: The Role of Open Government and Citizen Participation. *Public Management Review*, 23(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1740303>

